



Anggaran Mengikuti Program

SINGKAWANG--Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie menekankan ke seluruh OPD dan jajarannya agar kelola keuangan harus benar sesuai tahapan dan kebutuhan pembangunan. "Saya ingatkan. Anggaran harus mengikuti program bukan program mengikuti anggaran. Jangan sampai ini ini punya siapa, ini punya kita, duitnya berapa, jangan sampai ini terjadi, " ungkapnya terkait sosialisasi penyusunan anggaran tahun 2019, Senin (17/9).

Ia menginginkan agar anggaran yang ada dikelola dan distribusikan tepat sasaran. Agar tepat sasaran maka tahapan demi tahapan penyusunan anggaran harus dilalui baik jadwal penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan. "Jadi seperti tahun ini terjadi lambatnya serapan anggaran karena keterlambatan dalam tahap memasukkan perencanaan, " jelasnya.

Selain itu, Tjhai Chui Mie juga meminta agar nantinya anggaran di kelurahan bisa ditingkatkan dan dikelola maksimal. "Anggaran di kelurahan ini perlu di tingkatkan agar pelayanan ke masyarakat maksimal. Ini saya lagi minta lurah, camat membuat program kerja mereka, " katanya.

Karena ia menginginkan kecamatan hingga kelurahan bisa menjadi ujung tombak pelayanan ke masyarakat. Artinya camat dan lurah harus banyak turun ke lapangan bertemu warga terkait kebutuhan pembangunan, meningkatkan kegotong royongan dalam rangka menjaga dan melestarikan hasil pembangunan itu sendiri. "Sehingga camat dan lurah serta ASN bisa bertemu dengan warga bertatap

muka sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Contoh, kata dia, misalkan ada pembangunan drainase, hasilnya sudah ada namun untuk melestarikannya butuh keterlibatan warga mulai RT hingga warga yang di depan rumahnya ada drainase yang dibangun. "Jadi pembangunan yang ada tetap terus dapat dinikmati warga itu sendiri karena hasil pembangunan ini merupakan tanggung jawab kita bersama menjaganya, " jelasnya.

Bahkan ia akan menelaah terkait perjalanan dinas yang ada. "Perjalanan dinas ini akan kita lihat lagi. Jika ada yang tidak perlu tidak usah dianggarkan. Sehingga dapat dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat untuk masyarakat," katanya. Dari hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 sekitar 900 Milyaran rupiah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Muslimin mengatakan sebelum dilakukan penetapan APBD 2019, maka Kemendagri rutin melakukan penekanan dalam penyusunan anggaran agar kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinkron. "Sudah menjadi perhatian pemerintah pusat sebelum daerah menetapkan APBD 2019 nantinya akan ada pedoman penyusunan APBD seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 38 tahun 2018 ini tentang Pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan belanja tahun 2019. Ini yang kita sosialisasikan kepada OPD," ungkapnya.

Dalam sosialisasi per-

mendagri ini, kata dia, menghadirkan narasumber dari Badan Keuangan Daerah Provinsi yang sudah pakar dibidangnya. Sehingga jajaran OPD di kota Singkawang bisa memahami, bertanya hingga mencari solusi atas persoalan dalam penyusunan anggaran.

"Dengan adanya sosialisasi ini nantinya ASN di OPD kota Singkawang ini tahu dan mengerti tatacara penyusunan anggaran. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan berulang dalam penyusunan anggaran yang disinyalir sering terjadi di tahun tahun sebelumnya, " jelasnya.

Penekanan penting dalam Permendagri ini, tambah Muslimin, adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tahun 2019 nantinya. "Karena belum tentu apa yang menjadi kebijakan daerah sinkron dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat hal inilah yang ingin diselaraskan," katanya.

Diharapkan seiring dengan pemahaman OPD-OPD tentang penyusunan anggaran ini maka pembahasan dan penetapan APBD 2019 bisa sesuai jadwal dan tidak relat. "Harapan kita November 2018 ini sudah bisa menetapkan APBD tahun 2019 yang disepakati Walikota dan DPRD Singkawang," harapnya.

Setelah sosialisasi ini nantinya, OPD di lingkup pemkot Singkawang sudah masuk tahapan proses pembuatan rencana kerja anggaran (RKA) karena Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 sudah disepakati bersama Walikota Singkawang dan DPRD. (har)



HAR/PONTIANAK POST

PENGARAHAN: Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat memberikan arahan. Senin (17/9) kemarin.